

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asihin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2012, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Effendy, Marwan, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis, Surabaya.
- Fajar, Mukti, dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Penerapan dan implementasi Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2019, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Koeswadi dan Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kurniawan, Syukri, 2021, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia, Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Langkun, Tama S., Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arif, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2022, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma dan Praktek*, Kencana, Jakarta.
- , 2020, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- , 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Panggabean, Mompang L., 2005, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ramadhana, Kurnia, Lalola Easter, dan Diky Anandya, 2022, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

- Saleh, Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, Matheus Nathanael, Nanda Oktaviani, Adery Ardhan Saputro, 2021, *Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syafruddin, H.M., 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Syamsudin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

C. Jurnal dan Tesis

- Arifin, Raden Muyazin, "Fungsi Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Mencerminkan Keadilan", *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2022.
- Chasani, Muchammad, 2020, Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fasrial, R. Subhan, 2015, "Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Gulo, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas dalam Tindak Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, Juli 2018.
- Gunarto, Marcus Priyo, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.
- Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih, "Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2, September 2021.
- Hastuti, Kurnia Siwi, "Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 2, No. 2, Juli 2021.
- Indarsih, Yuli, "Peranan Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan", *Media Bina Ilmiah*, Vol.15, No.4, November 2020.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Mei 2021.
- Prang, Amrizal J., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (2011): 77-94.
- Setiawan, Hendi, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor:

669/Pid.Sus/2018/Pn.Btm)", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2021.

Suyatno, Hendrikus, 2021, "Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Zulfa, Eva Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 2, Juni 2011.

D. Internet

TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Mengalami Penurunan Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi", <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi-2/>, diakses pada 1 Maret 2023.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, "Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor", <https://mappifhui.org/sosialisasi-publik-perma-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor>, diakses pada 1 Maret 2023.

Hukum Online, "Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim-lt5f2bfe025dc90/>, diakses pada 9 januari 2024.